

SKRIPSI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG

Oleh

AZFRIL

NIM.105730472614



JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018

HASIL PENELITIAN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK

DAERAH (BUMD) DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN ENREKANG.

Oleh

Azfril

105730472614

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi Pada Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

Program Studi Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur sebesarnya kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan , selawat p*

*Kepada baginda Rosulullah SAW, beserta para sahabat dan keluarganya.*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

*Ayahanda Sahaman dan ibunda Napira untuk do'a dan kasih sayang yang mengalir tiada henti, dan saudara-saudara saya yg selalu mendukung dari belakang.*

*Semua guru-guru dan dosen ku yang pernah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.*

## **Motto**

**Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. (QS. Ar Ra'd : 28)**

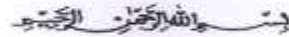
**Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar, meskipun seberat zarah, akan dilihatnya (balasan kebaikan itu), barang siapamengerjakan kejahatan, meskipun seberat zarah akan dilihatnya (balasan) kejahatan. (QS. Al Zalzalah : 7-8)**

**Karena itu jangan merasa lemah dan jangan pula bersedih hati,engkaulah yang menang dan lebih unggul, kalau sekiranya kamu beriman. (Q.s. Ali Imran: 139)**

**Hanya penderitaan hidup yang mengajarkan manusia untuk menghargai kebahagiaan dan kebaikan hidup.**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : \*Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  
Enrekang.\*

Nama Mahasiswa : AZFRIL  
No. Stambuk : 105730472614  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

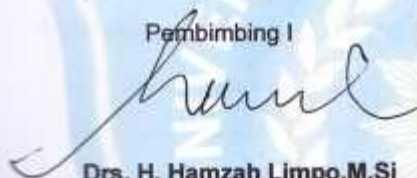
Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia  
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

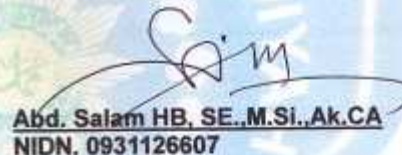
Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si**  
NIDN. 0017075201

  
**Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA**  
NIDN. 0931126607

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi

  
Dekan  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM. 903078

  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP**  
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **AZFRIL**, NIM : **105730472614**, diterima dan diperiksa oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:123/Tahun 1440H/2018M, Tanggal 22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, **44 Rabiul Akhir 1440 H**  
**22 Desember 2018 M**

### PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM   
2. Faidul Adzim, SE, M.Si   
3. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.CA   
4. Ismail Rasulong SE., M.Si 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZFRIL  
Stambuk : 105730472614  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah  
(BUMD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Kabupaten Enrekang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun***

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Desember 2018  
Yang Membuat Pernyataan



Diketahui oleh

Dekan,

Ketua Prodi Akuntansi,



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM. 903078

Ismail Bedottahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP  
NBM. 107 3428

## **ABSTRAK**

**AZFRIL, 2018.** *Analisis laporan keuangan badan usaha milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.* Dibimbing oleh (Hamzah Limpo dan Abd. Salam)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan badan usaha milik daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan seberapa besar kontribusi badan usaha mili daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai laporan keuangan daerah dan kontribusinya dalam pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini adalah Laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah telah benar-benar sesuai dengan peraturan dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pencatatan laporan kertas kerja, neraca, laba rugi, ekuitas, arus kas, pajak, piutang, persediaan, dan pelaporan kas telah dilaporkan secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dan Badan Usaha Milik Daerah tidak berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat dari besarnya persen yg didapat dari rentabilitas terhadap modal sendiri sebanyak -17% dari laporan laba rugi perusahaan, namun perlu dikehui bahwa BUMD memberikan kontribusi sebanyak Rp.100.000.000.00 ditahun yg digunakan untuk belaja daerah kabupaten enrekang"

**Kata kunci: Peraturan Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, PAD, Rasio Keuangan**

## **ABSTRACT**

**AZFRIL , 2018.** *Analysis of financial statements of regional-owned enterprises in increasing local revenue.* Guided by (H amzah Limpo and Abd. Salam)

This study aims to find out whether the financial statements of regionally owned enterprises are in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006 and how much the contribution of regional business entities in increasing local revenue.

This study uses a descriptive research method with a quantitative approach. The analysis technique used in this study is the ratio, this study is intended to get an overview and information about the regional financial statements and their contribution to the original regional income.

The results of this study are the financial statements of regionally owned enterprises have been in accordance with domestic regulations No. 13 of 2006 concerning the financial statements of local governments seen from the recording of working paper reports, balance sheets, profit and loss, equity, cash flow , taxes, receivables , inventory, and reporting of cash has been reported in an orderly, obedient perundang law, efficiency, economical, effective, and accountable to demonstrate the principles of justice, compliance and benefit to society should be a people and regional-owned enterprises do not contribute either to the Regional Revenue visits of the percent amount obtained from the vulnerability to own capital as much as -17% of the company's profit and loss report, but it needs to be understood that the BUMD contributes as much as Rp. 100,000,000.00 in the year used for Enrekang regency education "

**Keywords: Domestic Regulation No.13 of 2006 , PAD, Ratio Finance**



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada haba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai mankalah penulisan skripsi yang berjudul “ *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang.*”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penuli sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Sahaman dan ibunda Napira yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tak pamrih. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan SKRIPSI ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail badollahi SE , M.Si, Ak, Ca, selaku ketua program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar.
4. Bapak Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abd. Salam, SE., M,Si. Ak,.Ca.CSP selaku pembimbing II yang telah berkenan dan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Ibu Mira selaku penasihat akademik yang membimbing selama masuk kampus samapai pada ujian skripsi.
7. Bapak faidhul adziem. Ibu muttiarni, ibu idra wahyuni, ibu Agus Diwana Suarnidan seluruh staf dosen serta asistem dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi akuntansi angkatan 2014 terkhusus nya ak 3 yang selalau belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk alhidayat, Adi firmansyah, Iksan, Sahabuddin, Riasabaria dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang

telah membrikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukunganya sehingga penulis dapat merampumkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya , sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karna itu,kepada semua pihak utama nya para pembaca yang budiman ,penulis senantiasa menharapakan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-Mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabilqul Khairat , Wassalamu “ Alaikum Wr. Wb.*

Makassar,..... Oktober 2018

**Azfril**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Fungsi Akuntansi .....	8
B. Pengertian Laporan Keuangan dan Pihak-Pihak Yang Berkepentingan .....	13
C. Alat Analisis Laporan Keuangan .....	20
D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	28
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	32

F. Penelitian Terdahulu.....	35
G. Kerangka Pikir .....	38
H. Hipotesis .....	39
<b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Defenisi Operasional .....	43
F. Metode Analisis .....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
B. Analisa Laporan Keuangan BUMD Kabupaten Enrekang .....	63
C. Analisa kontribusi BUMD terhadap PAD .....	72
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Jenis Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	40
4.1	Struktur Organisasi BPKD	47

## DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
2.1	Analisis Rasio Keuangan	25
2.2	Tinjauan Imfiris	36
4.1	Laporan Arus Kas	64
4.2	Neraca	66
4.3	Laporan Perubahan Ekuitas	67
4.4	Laporan Laba Rugi	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara merata lebih adil dan berkembang. Untuk langkah pertama menuju yang harus dilakukan yakni mewujudkan kebijakan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam suatu Undang-Undang yang mencakup kedaerahan yakni UU No. 22 tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah yakni, UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.33 tahun 2004.

Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan dalam pelaksanaan yakni diantaranya, Peraturan Pemerintah No. 105 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan saat ini sudah direvisi menjadi UU No. 56 tahun 2005 mengenai system keuangan pemerintah yang memberikan defenisi terhadap akuntansi pemerintah daerah sebagai proses pencatatan pengelolaan, dan pegihtisan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umum bersifat keuangan termaksud pelaporan atas realisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip ekonomi seluasnya dalam system.

Tidak hanya sampai disitu diterapkan peraturan pemerintah No. 13 tahun 2006 sebagaimana kelanjutan untuk memperbaiki system keuangan pemerintah daerah agar:



1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat .
2. Pengelola keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Laporan Keuangan seperti yang kita ketahui bahwa laporan pertanggung jawaban manajer suatu perusahaan, karena laporan keuangan ialah gambaran keuangan dari setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi dimasa yang lalu. Dan kita ketahui pula bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi baik dari segi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan, dan pihak luar pemerintah seperti halnya perusahaan, investor, bank, maupun dari pihak calon investor karena kepentingan laporan keuangan berbeda , sesuai akan kepentingan masing-masing. Perlu diketahui laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Diantara laporan keuangan menurut pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah
3. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah
4. Catatan Atas Laporan keuangan

Laporan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan otomi daerah yang berlaku saat ini di negara kita, dan lagi-lagi bahwa masalah mengenai laporan keuangan daerah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Diera

seperti ini pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk sebagaimana untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada sekarang dan upaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pada tingkat masyarakat.

Perusahaan-perusahaan milik daerah yang mana kita sering kenal dengan nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pada sampai saat ini jarang sekali kita dengan disorot oleh media sebagai pembahasan wacana publik. Dan kita tidak ketahui bahwa sebenarnya dalam BUMD terdapat banyak asset daerah yang terkandung didalamnya dinegara kita, dan apa bila kita kaji lebih jauh itu memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan dan dikelola dalam meningkatkan dari pada pendapatan asli daerah yang bersangkutan. Beberapa pemerintahan daerah yakni di Kabupaten Tanah Toraya Utara, kabupaten Toraya dan Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan (Sul-Sel) yang mana pada sampai saat ini telah melakukan beberapa kebijakan Pemda untuk mengembangkan dan memberdayakan BUMD yang dimiliki.

Upaya tersebut sebagai media, Pemerintah daerah kabupaten Enrekang akan menyerahkan pengelolaan manajerialnya kepada para profesional untuk mendorong pertumbuhan BUMD yang sampai saat ini kurang berkemajuan. Perlu kita ketahui bahwa pemda kabupaten Enrekang memiliki beberapa BUMD diantaranya pemasaran, perusahaan air minum dan lain-lain. BUMD kabupaten Enrekang terkhusus pada perusahaan air minum (PDAM) dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), telah mengambil langkah-langkah untuk mengarah pencapaian laba dari laba, maka sasaran jangka panjang perusahaan dapat dicapai dimana perusahaan ingin berkembang

dan tumbuh pada gilirannya maka ia go publik dan masuk ke pasar modal atau pasar bursa.

Berkaitan akan kebijakan otonomi daerah BUMD memiliki peran yang diharapkan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Peran ini tidak mudah terwujud disebabkan karena badan usaha milik Negara (BUMN) dan kita ketahui bahwa BUMD selama ini dikelola oleh iklim birokrasi yang tidak efisien dan kurang profesional untuk menjalankannya. Dilihat dari berbagai segi persoalan BUMD sangatlah relevan untuk dibahas mengingat kebutuhan sumber daya keuangan yang mampu menunjang peningkatan pendapatan asli daerah sangat mendesak.

Persoalan permodalan memang menjadi suatu hambatan yang mana dihadapi oleh pihak BUMD, dikarenakan BUMD pada umumnya tidak bisa secara bebas mengambil kebijakan keuangan kecuali atas persetujuan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam menuju pengembangan BUMD supaya lembaga bisnis daerah ini mampu berperan secara mandiri dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dibalik semua itu kendala yang dihadapi seperti halnya peraturan, rendahnya kualitas SDM, cara kerja birokratik yang mana menghambat inovasi, perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Dengan berbagai kendala diatas sangat sulit bagi pihak BUMD untuk melakukan terobosan terutama dalam penyehatan dan pengembangan perusahaan.

Masalah yang penting ialah pengelolaan keuangan daerah termasuk pengendalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatannya dalam bagi pembangunan daerah. Peran ini diharapkan dilakukan oleh BUMD. Untuk meletakkan peran BUMD seperti yang telah dikemukakan di pelukan stratejik tertentu. Namun langkah-langkah ini berbeda bagi berapa BUMD karena

diketahui bahwa masing-masing pemerintah daerah itu berbeda dari segi kebijakan.

BUMD Kabupaten Enrekang dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan hanya menyajikan laporan realisi anggaran saja karena tidak melakukan penyusunan neraca, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Dengan demikian bahwa tidak sesuai Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Dengan hal tersebut dapat menyebabkan:

1. Para pengguna laporan keuangan tidak bisa menilai kemampuan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang dalam menghasilkan arus kas.
2. Laporan keuangan tidak bisa dipahami oleh pembaca secara luas yakni masyarakat, legislative, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan peminjaman dan pihak pemerintahan.

Permasalahan yang ditemui oleh penulis adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana yang sangat minim berakibatkan pada laporan keuangan yang dibuat cenderung apa adanya dan tidak efisien. Disamping itu masalah sumber daya manusia menjadi hal dominan yang perlu dibenahi mengingat kompetensi para pelaksana keuangan daerah yang belum tersosialisasi secara luas untuk penyusunan laporan keuangan BUMD lebih transparan dan bisa dipublikasikan di media dan BUMD kabupaten Enrekang belum memperlihatkan dari pada eksistensi dalam berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Apakah laporan keuangan pemerintah pada BUMD telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006”.
2. “Seberapa besar kontribusi BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diKabupaten Enrekang”

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan diadakan adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan Laporan Keuangan BUMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
2. Mengetahui berapa kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan pada pihak perusahaan yang bersangkutan, utamanya pada pihak PDAM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah No. 24 tahun 2005, dan

tahu seberapa besar perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi penulis bahan latihan dalam memecahkan masalah dalam penerapan laporan keuangan pada BUMD terkhusus pada PDAM kabupaten Enrekang, dan mengetahui pentingnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Bagi pembaca sebagai acuan atau referensi dalam melanjutkan penelitian yang sama

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Dan Fungsi Akuntansi**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, laporan keuangan yang disusun harus dapat menyajikan laporan yang memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik internal maupun external. Fenomena yang sekarang muncul adanya tuntutan transparansi yang mencerminkan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga public terutama pemerintah.

Penyajian dan penyajian laporan keuangan mengacu pada standard akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan IAI. Secara garis besar SAK berisi 59 PSAK berserta kerangka dasar penyusunan yang mendasarinya, yang mendasari dari penyusunan SAK oleh IAI merupakan hasil dari adaptasi *Internasional accounting standard*.

#### **1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi sering juga disebut “bahasa bisnis” karena akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan baik pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah perusahaan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran dan penyimpanan informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan.

*American institute of certified public accounting* dalam Sofyan Syafri Harap (2005 : 4) mendefinisikan akuntansi dengan pengertian sebagai berikut:

*“akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,*

*transaksi atau kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termaksud menafsirkan hasil-hasilnya”.*

Abdul Halim (2015: 6) memberikan pula definisi bahwa akuntansi yang diterjemahkan sebagai:

*“Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa. Fungsinya adalah penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan ekonomi dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternative”.*

Mardiasmo (2002 : 106) memberikan pula definisi yang diterjemahkan sebagai:

*“ Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi dan social atas suatu entitas yang dapat didefinisikan dan memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”.*

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa Akuntansi adalah suatu kegiatan pencatatan dalam suatu ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menggolongkan dan mengiktisarkan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### a. Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah berkaitan dengan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana perusahaan yang tergolong dalam lembaga mikro. Sehingga akuntansi pemerintah sebagaimana digolongkan pula dalam akuntansi mikro.

Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada penggolongan dana masyarakat dilembaga-



lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sktor publik dan swasta (Indara Bastian, 2006 : 15)

#### b. Akuntansi Daerah

Akuntansi pemerintahan daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas/instansi pemerintah daerah (pemda) seperti kabupaten, kota ataupun provinsi) yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal ataupun eksternal.

Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daerah telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara kebetulan terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut :

1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)

SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.

2. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)

SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:

- a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.
- b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

## 2. Fungsi Akuntansi

a. Recording Report

Fungsi utama dari akuntansi adalah untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis dari begitu banyaknya transaksi keuangan yang selanjutnya dikirim ke berbagai *Account ledger* dan akhirnya mempersiapkan akun akhir untuk mengetahui laba atau rugi dari perusahaan pada akhir periode akuntansi.

b. Melindungi Properties

Fungsi akuntansi lainnya adalah untuk menghitung jumlah real dari penyusutan asset dengan memilih metode yang tepat dan berlaku untuk asset tertentu. Setiap investasi tidak sah dari setiap asset akan membawa perusahaan ke ambang kebangkrutan. Karena akuntansi merancang sistem yang diinginkan untuk melindungi properti dan asset perusahaan dari penggunaan yang tidak sah dan tidak beralasan.

c. Komunikasikan Hasil

Akuntansi selalu mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang cacat kepada pihak yang terkait dalam perusahaan tertentu seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dll.

d. Meeting Legal

Akuntansi juga berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang akan selalu memenuhi dan persyaratan hukum untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengambilan pendapatan pajak, pengambilan penjualan pajak, dll.

e. Klasifikasi

Fungsi akuntansi sebagai klasifikasi berkaitan dengan analisis sistem dari data yang tercatat, dengan maksud untuk transaksi kelompok atau entri dari suatu alam disatu tempat pekerjaan klasifikasi.

f. Summarize

Ini melibatkan dengan menyajikan data rahasia dengan cara yang dapat dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi proses ini mengarah pada

penyusunan laporan berikut: 1. Neraca saldo, 2. Laporan Laba Rugi, dan 3. Neraca

g. Menganalisis Dan Menafsirkan

Ini adalah fungsi akhir akuntansi. Data keuangan yang direkam dan diinterpretasikan dengan cara yang akhirnya pengguna dapat membuat penilaian yang berarti tentang kondisi keuangan dan profitabilitas operasi perusahaan. Data tersebut juga digunakan untuk mempersiapkan rencana masa depan dan framing dari kebijakan untuk melaksanakan rencana tersebut.

## **B. Pengertian Laporan Keuangan dan Pihak-pihak Yang Berhubungan**

### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat sembarangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Untuk memudahkan memahami dari pengertian Laporan Keuangan beberapa ahli dalam bidang ini berpendapat sebagai berikut:

Mahmudi (2007: 11) Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas.

Munawir (2010 : 5 ) Laporan Keuangan adalah Dua daftar yang disusun Akuntan diakhir periode untuk satu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan persoalan-persoalan untuk menambahkan daftar ketiga surplus atau daftar laba yang akan dibagikan (laba yang ditahan)

Hanafi dan Halim (2007 : 49) laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti

informasi industry, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.

Kamsir (2017 : 7) Laporan Keuangan adalah Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu

Pada dasarnya laporan keuangan terdiri dari neraca perhitungan rugi-laba serta laporan perubahan modal, laporan pencatatan atas laporan keuangan dan laporan kas dimana Neraca menunjukkan jumlah aktiva, modal dan hutang pada suatu perusahaan pada tanggal tertentu, Perhitungan Rugi Laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan dana yang menyebabkan perubahan modal perusahaan, Laporan Catatan Atas Laporan keuangan menggambarkan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya dan jelas pula data yang disajikan, Laporan Kas menunjukkan arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar pada suatu perusahaan.

a. Tujuan laporan keuangan

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan salah satu bagian dari Standar akuntansi pemerintahan dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah.

Mahmudi (2007 : 4-5) Tujuan dari pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dalam alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan perundang-undangan.
3. Menyediakan mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencakup kegiatan kasnya,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

Ditarik kesimpulan dari tujuan laporan keuangan adalah bertujuan untuk menyajikan/memberikan informasi mengenai posisi keuangan, dan perubahan keputusan, laporan keuangan juga merupakan alat akuntabilitas publik.

#### b. Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan

Kamsir (2017 : 30, 45) unsure-unsur pelaporan yang pokok adalah:

##### 1. Unsure posisi keuangan (Neraca)

Masing-masing unsure berkaitan dengan posisi keuangan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

a. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membermanfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa depan.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masalah, yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (aktiva bersih). Meskipun demikian, didalam neraca ekuitas dapat di subklasifikasikan .

2. Unsur Kinerja Keuangan (Laba-Rugi)

Unsure yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan disajikan pada laporan keuangan yang disebut laba rugi. Masing-masing dari unsure yang berkaitan dengan perusahaan tersebut didefenisikan sebagai berikut:

a. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu priode akuntansi atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi (storan) penanaman modal.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan modal.

## **2. Pihak-Pihak Yang Berhubungan Dengan Laporan Keuangan**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan baik internal maupun pihak eksternal.

Berikut penjelasan masing-masing pihak yang berhubungan terhadap laporan keuangan.

a. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham merupakan pihak pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah::

1. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
2. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan selama satu periode.
3. Untuk melihat kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan..



b. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja dalam satu periode tertentu. Berikut nilai penting laporan keuangan bagi pihak manajemen:

1. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam satu periode, apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
3. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
4. Laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan kedepan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian ke depan sehingga target-trget yang diinginkan tercapai.

c. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi pihak perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan

lainnya. Bagi pihak kreditor prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

1. Pihak kreditor tidak mau usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pelayanan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet).
2. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajiban.
3. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit yang berikan justru menjadi beban nasah dalam pengembalian apa bila ternyata kemampuan perusahaan diluar dari yang diperkirakan.

d. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pemerintah:

1. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
2. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap Negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan.

e. Investor

Investor pihak yang hendak melaporkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula memndapat pinjaman dari investor melalui penjualan saham. Dalam memilih sumber dana perusahaan pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan seperti factor bunga dan jumlah angsuran kedepan. Namaun, disisi lain, perusahaan ingin juga memberikan peluang kepemilikan kepada masyarakat atau pihaklainnya.

### C. Alat Analisis Laporan Keuangan

Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan-gabungkan angka-angkadidalam antara laporan rugi-laba dan neraca. Dengan cara rasio semaacam itu pengaruh perbedaan ukuran akan hilang.

Mahmudi (2007: 92) Beberapa jenis rasio keuangan memang ada yang kurang relevan untuk sector public, seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan,perputaran asset, ROA, dan ROI. Rasio-rasio tersebut lebih cocok untuk sector bisnis yang mencari laba, karena tujuan menggunakan rasio tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, disektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan di sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun, ada juga analisis rasio keuangan yang dapat digunakan baik di sektor bisnis maupun publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas.

Rasio-rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah menurut, antara lain :

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis likuiditas ada beberapa rasio yang biasa dipelajari, yaitu :

1) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio memiliki asset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Nilai rasio lancar yang dianggap lancar adalah 2:1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik asset lancar. Tetapi nilai nominal yang masih biasa di terima adalah 1:1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar. Rasio Lanjar dapat dirumuskan sebagai beriku:

$$R \quad La = \frac{A}{H} \frac{L}{L} \times 100\%$$

2) Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar

utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio Kas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad K = \frac{K + s \quad b \quad ha}{H \quad L} \times 100\%$$

### 3) Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1:1. Rasio Cepat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad C = \frac{A \quad L \quad - Pe}{H \quad L} \times 100\%$$

### 4) Working Capital to Total Assets

Working capital to total assets adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Rasio Modal Kerja Terhadap Aset Total dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$W \quad C \quad t \quad T \quad A = \frac{A \quad L \quad - H \quad L}{T \quad A} \times 100\%$$

### 5. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai yang dianggap baik untuk

rasio solvabilitas adalah 1:1. Rasio Solvabilitas dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad S = \frac{T \quad A \quad a}{T \quad H} \times 100\%$$

#### 6. Rasio Utang (Leverage Ratio)

Rasio Hutang sangat penting bagi kreditur dan calon kreditur potensial pemerintah daerah dalam membuat suatu keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditur untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Terdapat beberapa jenis rasio utang yang perlu diketahui antara lain:

##### a. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dan yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin sudah kelebihan utang, dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad H \quad T \quad h a \quad E = \frac{T \quad H}{J u \quad h E \quad D} \times 100\%$$

##### b. Rasio Utang Terhadap Aset Modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Perusahaan tidak diasumsikan untuk dilikuidasi karena kreditur tidak bisa mengklaim aset modal perusahaan jika terjadi kegagalan dalam

membayar utang, kreditor tidak dapat memailitkan badan usaha milik daerah (BUMD). Rasio ini kurang relevan jika digunakan dalam operasi sektor public. Rasio Utang Terhadap Aset Modal dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Utang\ Terhadap\ Aset\ Modal = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset\ Modal} \times 100\%$$

c. *Time Interest Earned Ratio*

*Time interest earned ratio* adalah rasio untuk mengetahui besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan utang jangka panjang. Rasio ini kurang tepat untuk digunakan dalam sektor publik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Time\ Interest\ Earned\ Ratio = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak}{Utang\ Jangka\ Panjang} \times 100\%$$

Rasio tersebut juga tidak bias dimodifikasi misalnya variable pembilangnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak diganti dengan “pendapatan pemerintah daerah”. Meskipun secara materealistis hal yang bias dihitung namun secara yuridis tidak dibenarkan karena undang\_undang melarang pemerintah daerah menggunakan daerah sebagai jaminan utang.

Berdasarkan laporan keuangan neraca, analisis terhadap rasio keuangan pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1.1 Analisis rasio keuangan

<b>RASIO KEUANGAN</b>	<b>THN 2006</b>	<b>THN 2005</b>
<b>RASIO LIKUIDITAS</b>		
Rasio Lancar	11 : 1	17 : 1
Rasio Kas	8 : 1	12 : 1
Rasio Cepat	8,5 : 1	12,3 : 1
Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset	0,020 : 1	0,014 : 1
<b>RASIO SOLVABILITAS</b>	66 : 1	285 : 1
<b>RASIO UTANG</b>		
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,015 : 1	0,003 : 1
Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,0158 : 1	0,0036 : 1

Jika dibandingkan dengan tahun 2005, rasio likuiditas dan solvabilitas menurun, tetapi nilainya masih sangat aman. Sebagai contoh angka rasio lancar yang dianggap wajar adalah 2:1, sedangkan rasio lancar mencapai 11:1. Rasio solvabilitas yang dianggap aman minimal 1:1, sedangkan rasio solvabilitas 66:1. Hal ini berarti pemerintah daerah secara keuangan sangat likuid dan solvable bahkan dapat dikatakan terlalu likuid (*over-liquid*)

### 3. Teknik dan Metode Dalam Analisis Laporan Keuangan

- a. teknik analisis laporan keuangan organisasi sector publik adalah sebagai berikut: Munawir (2010 : 35-37),



### 1. Analisis asset

Analisis asset yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan infestasi diwilayah itu, bagaimana skala ekonomi pemerintah daerah dan kondisi keuangan.

### 2. Analisis Kewajiban dan ekuitas Dana

Analisis utang sangat penting bagi calon pemberi pinjaman (kreditur) dalam memberi keputusan kredit, sangatlah bermanfaat untuk mengetahui beban utang, keseimbangan fiskal, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi komposisi ekuitas dana untuk mengetahui orientasi alokasi dana pemerintah yaitu seberapa besar dana yang ditanamkan untuk operasi rutin, dan seberapa dalam bentuk investasi.

### 3. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai pemerintah daerah.

#### 4. Analisis Belanja

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara Ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Belanja daerah perlu memperoleh perhatian lebih besar karena belanja daerah lebih rawan mengalami kebocoran anggaran dibandingkan kebocoran pada sisi pendapatan.

#### 5. Analisis Pembiayaan

Informasi pembiayaan penting untuk menilai keputusan pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat. Struktur pembiayaan pemerintah daerah juga biasa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah yang juga berpengaruh pada tingkat rasio daerah.

b. Ada dua metode analisis keuangan, yaitu: Menurut Falikhatul dan Nugrahnengsi (2007 : 9),

##### 1. Analisis Vertikal

Analisis vertical yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui atau hasil operasi pada saat itu saja.

##### 2. Analisis Horisontal

Menurut Prastowo dan Juliati (2002), secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

d. Metode Analisis Horizontal

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.

e. Metode analisis vertikal (statis)

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos satu dan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk satu tahun (periode) yang sama

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa metode analisis di atas mengenai laporan keuangan adalah:

a. Metode Horizontal (dinamis)

Metode analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dalam beberapa periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik atau yang bergerak pada sektor swasta.

b. Metode Analisis Vertikal (statis)

Metode analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan dalam satu periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi publik atau sektor swasta

#### **D. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD adalah sebuah perwujudan dari era pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi daerah. Namun demikian perkembangan BUMD justru menjadi titik lemah keuangan daerah. Alih-alih menjadi sumber penerimaan, BUMD justru membebani keuangan daerah. Buruknya kinerja BUMD adalah salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi pemerintah daerah di Indonesia. Realitas yang ada banyak BUMD yang mengalami inefisiensi, sehingga membebani pemerintah daerah. Untuk menutup BUMD yang tidak efisien bukan pekerjaan yang mudah, masa depan karyawan BUMD adalah pertimbangan utama dalam melakukan efisiensi.

Kaca mata bisnis sebenarnya banyak BUMD yang tidak profitable, namun kita harus mengingat bahwa banyak BUMD yang tujuannya memberikan pelayanan kepada publik dan memang tidak profit oriented. Hal ini dikarenakan ada komoditas tertentu yang sebaiknya ditangani pemerintah, misalnya pengadaan air bersih.

BUMD di Indonesia pada umumnya masih terjebak pada pola kerja birokrasi yang tidak efisien. Banyak BUMD yang lebih menekankan fungsinya sebagai birokrat daripada sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan value yang akan disampaikan kepada konsumen. Pengertian ini disebut dengan customer value. Customer value adalah beberapa keuntungan yang diharapkan konsumen dari sebuah produk (Kotler, 2003). Perusahaan dalam operasinya harus berorientasi pada penyampaian customer value ini. Hal ini akan menjamin adanya kepuasan konsumen yang akan meningkatkan profit perusahaan. Pengertian tentang customer value ini

harus dipahami benar oleh direksi BUMD Jateng, sebelum melakukan perbaikan kinerja. Mereka harus memandang bahwa semua layanan yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan konsumen. Saat ini sudah bukan zamannya lagi perusahaan milik pemerintah daerah untuk menggunakan paradigma birokrasi, dimana keputusan strategis perusahaan dilandasi oleh perintah atasan. Mereka harus melakukan keputusan bisnis berdasarkan logika bisnis, artinya demi kepentingan konsumen yang akan bermuara pada peningkatan keuntungan.

Konsep manajemen untuk perusahaan daerah atau BUMD adalah sama dengan konsep manajemen untuk organisasi nir-laba. Sebuah artikel lama dari Kotler & Levy (1969) dengan judul *Broadening Concept of Marketing* mengemukakan, dalam konsep pemasaran bagi organisasi nir-laba, penyampaian value kepada konsumen sangat tergantung dari praktik 4 P yaitu price(harga), product (produk), place(distribusi) dan promotion (promosi). Selanjutnya kita akan sedikit mengupas keempat aspek tersebut. Kebijakan harga yang dilakukan oleh BUMD harus dilakukan berdasarkan kemampuan konsumen. Selain tentunya tingkat harga yang berada pada keuntungan normal. Penentuan harga ini harus berhati-hati karena biasanya BUMD adalah perusahaan yang memegang monopoli, sehingga dalam hal ini konsumen mempunyai daya tawar-menawar rendah. Mereka tidak mampu melakukan apapun meskipun kenaikan harga tersebut berupa Perusahaan Daerah tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Dalam hal ini PDAM yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor: 3 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum BUMD.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 4 Tahun 1984, Nomor:27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum didirikan dengan Perda berdasarkan UU No.5 Tahun 1962 jo. UU No.2 Tahun 1969. Sifat perusahaan adalah memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dalam pasal 5 menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat:(1) memberi jasa,(2) menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan (3) memupuk pendapatan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas dasar inilah maka jasa air minum diusahakan oleh perusahaan daerah melalui PDAM.

Eisiensi dihitung untuk masing-masing UKE, untuk memperoleh optimasi dengan menggunakan CCR (Charnes, Cooper, Rhoders). Misalnya masing-masing UKE yang dievaluasi dinotasikan UKE, masing-masing UKE<sub>j</sub> selanjutnya dievaluasi satu persatu dinotasikan dengan UKE<sub>0</sub>, dimana dari 1,2- n. Bobot input dan bobot output selanjutnya diperoleh dengan fractional program sebagai berikut :

Dalam DEA, efisiensi relative UKE di definisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi dengan total input tertimbang (total weighted output/ total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat: (1) tidak bernilai negative, (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam

sample harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya ( $\text{total weighted output}/\text{total weighted input}$ ) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 ( $\text{total weighted output}/\text{total weighted input} \leq 1$ ).

DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiennya ( $\text{maximize total weighted output}/\text{total weighted input}$ ). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula maka setiap UKE akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimalkan efisiensi dari suatu UKE.

#### E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan otonomi daerah (Ruduansyah, 2003).

Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Widjaja (2003 : 42) pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar

pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha suatu daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

(1) Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardismono, 2008)



## 2. Retribusi Daerah

Halim, (2008 : 97) retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau perkantoran, retribusi penjualan produksi uaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perijinan pelayanan dan pengendalian

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-undang nomor 33 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

## 4. Lain-Lain Penpatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antar pemerintah daeran dan pusat, menjelaskan penapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk mengganggarkan penerimaan daerah yang tidak termaksud dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan perundang-undangan No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan

jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

Selain menganalisis pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan data actual dan riil yang telah ada, dan juga akan membuat estimasi atau prediksi PAD Kabupaten Buleleng untuk tahun 2014 dengan menggunakan analisis trend dengan berdasar data tahun 2009-2013. Dengan analisis trend ini memungkinkan untuk melakukan estimasi dan menganalisis data pada tahun-tahun selanjutnya. Masing-masing sumber PAD tahun anggaran 2009-2013 akan dianalisis menggunakan analisis trend, sehingga menemukan persamaan trend. Setelah itu, persamaan trend tersebut akan digunakan untuk menghitung dan mengestimasi sumber-sumber PAD pada tahun anggaran 2014. Sumber PAD tersebut akan dicari besar efektivitas dan kontribusinya dalam tahun anggaran 2014. Hasil dari perhitungan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak atau lembaga yang membidangi pendapatan daerah.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1 : Tinjauan Imfiris**

<b>No</b>	<b>Nama peneliti, Judul Penelitian</b>	<b>Metode Analisis dalam Penelitian</b>	<b>Hasil dalam penelitian</b>
1	Herman Karamoy Analisis penerapan PP. No. 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamobagu (20014)	Metode Yng dipakai pada penelitian ini adalah Deskriptip	DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan

			keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan
2	Agustinus Numberi "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika" (2017)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif	Sumber pertumbuhan melalui komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni rerata komponen Pajak Daerah memperoleh penilaian Elastis, Retribusi Daerah memperoleh penilaian Inelastis, Laba BUMD dan Aset Daerah memiliki penilaian Unitary Elastis, dan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah memperoleh penilaian Elastis. Sehingga melalui informasi ini, maka sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika di persembahkan oleh komponen Realisasi Pajak Daerah, Laba BUMD dan Aset Daerah.
3	Mena elvina "Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Terhadap BUMD Kota Tanjungpinang (2017)"	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif	Kebijakan penyertaan modal daerah terhadap PT. TMB Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 terlaksana secara baik, hal ini karena tidak ada faktor-faktor negatif yang mempengaruhi perumusannya. pada tahun 2012, pelaksanaan perumusannya dikatakan kurang baik karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni berupa tekanan dari luar, pengaruh sifat pribadi dan pengaruh

			kelompok luar. Pengaruh tersebut berasal dari partai politik, kelompok masyarakat pengguna jasa lapak BUMD serta pengutamaan kepentingan pribadi perumus kebijakan
4	Immas Nurhayati "Analisis break even point ( <i>BEP</i> ) dalam penetapan Tarif jasa transportasi pada perusahaan daerah jasa transportasi Kota Bogor" (2017)		ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga keberlanagsungan perusahaannya, selain disebabkan oleh inefisiensi, juga diakibatkan oleh rendahnya penetapan tarif jasa angkutan Trans Pakuan tidak diimbangi oleh jumlah pengguna jasa angkutan tersebut sehingga jumlah pemasukan dari hasil penjualan sangat rendah.
5	Bayu Purnomo Aji "Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikabupaten Buleleng" (2015)	Metode yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian yakni Metode Deskriptif	Sumber Efektipitas PAD tahun anggaran 2009-2013 berada pada kategori efektif dengan rata-rata 112,48%. Sedangkan kontribusi terbesar pada tahun anggaran 2009-2013 diperoleh dari lain-lain yang sah sebesar 43,13%. Estimasi anggaran ditahun 2014 menunjukkan seluruh mengalami peningkatan penerimaan kecuali redribusi daerah.
6	Aat Ruchiat Nugraha "Implementasi Komunikasi perusahaan pada BMUD Kota Bandung" ( 2014)	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Explanatory Survey (Deskriptif)	Komunikasi perusahaan PDAM kota Bandung dalam bentuk dialog interaktif diradio swasta lokal dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan prilaku positif dan pelanggan terhadap perusahaan.

7	Rosida Toselong "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo" (2015)	Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif	Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas)
8	Wi kadek alit apriliani "Pengaruh penyajian laporan keuangan dan akseibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah" (2014)	Metode yang pdigunaka dalm penelitian ini adalah metode Kuantitatif	Penyajian laporan keuangan karesteritik kualitatif laporan keuangan dan akseibilitas berpengaruh secara signipikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara persial dan simultan
9	Ihwah Kema " penyajian laporan keungan daerah berdasarkan standard akutansi pemerintah kota Manado" (2013)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode Deskriptif	Pemerinah kota Manado dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP ditahun 2011, terlihat pada pos bagi hasil kepada propensi dn pemerintahan desa pada pos belanja da biaya dibayar dimuka pad asset lancar, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah kot Manado telah berpedoman pada SAP dala penyajian laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
10	Umy Riyanti "Analisis laporan keuangan pemerintah pada dinas bina marga dan sumber daya air kabupaten pelalawan" 2011	Dalam penelitian ini mnggunakan metode Deskriptif kualitatif	laporan keuangan pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

## G. Kerangka Pikir

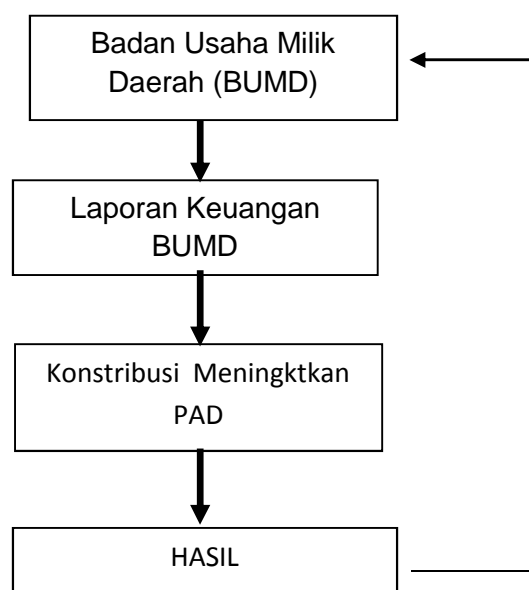
BUMD adalah sebuah perwujudan dari era pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi daerah,. Namun demikian perkembangan BUMD justru menjadi titik lemah keuangan daerah.

kaca mata bisnis sebenarnya banyak BUMD yang tidak profitable, namun kita harus mengingat bahwa banyak BUMD yang tujuannya memberikan pelayanan kepada publik dan memang tidak profit oriented. Hal ini dikarenakan ada komoditas tertentu yang sebaiknya ditangani pemerintah, misalnya pengadaan air bersih.

Dengan adanya BUMD sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, pendapatan BUMD dapat dirasakan masyarakat dan diketahui bahwa BUMD tidak merpatokan pada seberapa besar laba yang didapat.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menerapkan kerangka piker penelitian pada BUMD sebagai berikut:

**Gambar 2.1 : Kerangka Pikir**



## **H. Hipotesis**

Berdasarkan dari kerangka pikir yang diuraikan penulis mengajukan hipotesis yang dirumuskan adalah:

1. Diduga bahwa Laporan Keuangan BUMD telah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2006 tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Diduga Bahwa kontribusi laba BUMD cukup baik dalam berperan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu :

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”

‘Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai laporan keuangan daerah dan kontribusinya dalam pendapatan asli daerah.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Data yang dibutuhkan, maka penulis memilih penelitian pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Pada waktu penelitian untuk memperoleh data, maka pengambilan data direncanakan kurang lebih 2 (dua) bulan.



### C. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), sebagai berikut:

- 1) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan Laporan Keuangan dan peranan alam meningkatkan PAD dalam penerapan komputerisasi untuk mengetahui apakah BUMD melakukan pencatatan Laporan Keuangan. Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan melalui cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data berkaitan dengan kebutuhan informasi pada Kantor BUMD

- b. Wawancara

Teknik interview dilakukan dengan jalan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Umum atau kepala bagian lainnya atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa pegawai Kantor BUMD Kota Enrekang dan mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Untuk menunjang kelengkapan dari penelitian ini, maka penulis mencoba memperoleh data yang terdiri dari atas:

1. Jenis data
  - a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil BUMD baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis.
  - b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari BUMD yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.
2. Sumber Data
  - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
  - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan berupa dokumen-dokumen dan buku literatur serta laporan tertulis dari luar perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Laporan keuangan BUMD adalah informasi yang disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
2. Kontes Laba adalah suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan

pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi.

3. Pendapatan Asli Daerah yakni pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## F. Metode Analisis

Menganalisis data dari laporan keuangan BUMD Kabupaten Enrekang maka peneliti menggunakan :

1. Analisis Rasio

$$a. R \quad L = \frac{H}{H} \frac{L}{L} \times 100\%$$

$$b. R \quad C = \frac{H}{H} \frac{L}{L} \frac{-P}{L} \times 100\%$$

$$c. R \quad K = \frac{K}{H} \frac{+S}{L} \frac{B}{L} \frac{Ha}{L} \times 100\%$$

2. Profitabilitas disebut juga Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba meliputi :

$$a. R \quad M \quad S = \frac{L}{M} \frac{S}{S} \frac{HP}{S} \times 100\%$$

$$b. R \quad M \quad P = \frac{L}{M} \frac{S_i}{P} \frac{HP}{P} \times 100\%$$

$$c. R \quad E = \frac{L}{M} \frac{S_i}{P_i} \frac{HP}{P_i} \times 100\%$$

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah maka disusun Laporan Laba Rugi dimana dalam laporan tersebut memperlihatkan berapa besar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Enrekang**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Cikal bakal keberadaan dari BPKD Kabupaten Enrekang yang sebelumnya menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 adalah merupakan hasil penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD yang sudah ada ditambahkan tugas baru yaitu Badan Pengelolaan Asset Daerah yang sebelumnya adalah bagian perlengkapan pada sekretariat daerah sehingga dibentuk organisasi perangkat daerah yang baru dan

berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau yang disingkat dengan DPKAD sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.

Kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan pemerintah tersebut maka dilakukan penataan dan peninjauan kembali terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipecah dan dimekarkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan bidang penerimaan DPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan bidang Asset dikembalikan menjadi Bagian Aset pada sekretariat daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

## **2. Struktur Organisasi BPKD Kab. Enrekang**

Berdasarkan peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja BPKD Kabupaten Enrekang, maka Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

Gambar 4.1

## Stuktur Organisasi BPKD



Sumber: (Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang)

- a. Kepala BPKD
- b. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Bidang Anggaran, Membawahkan:
  - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Otorisasi Anggaran;
- d. Bidang perbendaharaan, Membawahkan:
  - a. Sub Bidang Belanja Langsung;
  - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah.

- e. Bidang Verifikasi, Membawahkan:
  - a. Sub Bidang verifikasi Penatausahaan Keuangan;
  - b. Sub bidang verifikasi pertanggungjawaban;
- f. Bidang Akuntansi Membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Neraca;

### **3. Visi dan Misi BPKD Kab. Enrekang**

#### 1. Visi:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparansi dan Akuntabilitas untuk gerakan membangun Enrekang maju dan sejahtera.

#### 2. Misi:

- a. Meningkatkan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur agar penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara Efektif, Efisien dan Akuntabilitas.

### **4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas BPKD Kab. Enrekang**

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Badan pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu

bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi;
- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
  - 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah;
  - 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan;
  - 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
  - 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan
  - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Memberikan petunjuk kepada sekretaris dan kepala bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Mengkoordinir kegiatan sekretaris dan kepala bidang lingkup badan pengelolaan keuangan daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.



- 3) Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, konsep naskah dinas, surat tugas, surat perintah, perjalanan dinas, surat undangan, nota dinas, lebar disposisi dan daftar hadir serta surat-surat lainnya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Daerah serta unsur terkait.
- 5) Melaksanakan konsultasi baik secara horizontal maupun dengan instansi yang lebih tinggi.
- 6) Menetapkan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJM, Visi dan Misi serta program Bupati dibidang pengolahan keuangan daerah.

## 2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi melaksanakan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Sekretaris mempunyai fungsi:
  - 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;

- 2) Menyelenggarakan kebijakan administrasi umum;
  - 3) Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan sub bagian;
  - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- c. Sekretaris Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
  - 2) Penyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
  - 3) Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - 4) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di Lingkup sekretariat;
  - 5) Mendistribusikan Tugas Kepada Sub Bagian Lingkup Sekretariat;
3. Sub Bagian Perencanaan
- a. Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program/kegiatan badan pengelolaan keuangan daerah.
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
    - 1) Melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
    - 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
    - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan

- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan rancangan rencana strategis Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Menyiapkan rancangan rencana anggaran satuan kerja Sub Bagian Perencanaan;
  - 3) Mengkoordinasikan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja sub bagian serta dokumen penetapan kinerja bagian dengan sekretaris dinas, kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 4) Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja dilingkup sub bagiannya;
  - 5) Membantu sekretaris badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup sub bagiannya;
  - 6) Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja sub bagian;
4. Sub Bagian Keuangan
- a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan.

- b. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
    - 2) Pelaksanaa program dan kegiatan sub bagian;
    - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
    - 4) Pelaksanaan evaluasi program dalam kegiatan dalam lingkup sub bagian.
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub bagian keuangan;
    - 2) Menyiapkan dan merumuskan rencana kerja anggaran sub bagian keuangan;
    - 3) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencan anggaran sub bagian keuangan dengan sekretaris badan, kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian umumdan kepegawaian;
    - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja dilingkup sub bagian;
    - 5) Membantu sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan keuangan badan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
    - 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
    - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
    - 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub.
  - c. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2) Menyiapkan dan merumuskan rencan kerja anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 3) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencan kerja anggaran sub bagian dengan sekretaris dan kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian keuangan;
    - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja lingkungan sub bagaian;
    - 5) Menyiapkan bahan koordiansi dalam melaksanakan tugas badan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur badan lingkup badan;
6. Bidang Anggaran
- a. Bidang anggaran dipimpin oleh seseorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas BPKD lingkup penyusunan anggaran dan petunjuk teknis dalam penyelenggraan penyusunan APBD, perubahan APBD, nota pengantar APBD, nota pengantar perubahan APBD dan Otorisasi anggaran.

b. Kepala bidang anggaran mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 3) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

c. Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi anggaran, belanja tidak langsung, dan belanja langsung dan pembiayaan;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Ulang APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- 4) Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usulan SKPD;

## 7. Sub Bidang Penyusunan APBD

- a. Sub bidang penyusunan APBD dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang

perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;

- b. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai fungsi:
    - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
    - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
    - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
    - 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
    - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
  - c. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang penyusunan APBD;
    - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan RKA SKPD dan RKA SKPKD;
    - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan RAPBD dan perubahan APBD;
    - 4) Pengkoordinasian RKA SKPD dan RKA SKPKD;
    - 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan perda APBD dan perubahan APBD dan rancangan perbup penjabaran APBD dan perubahan APBD;
8. Sub Bidang Otorisasi Anggaran
- a. Sub bidang otorisasi anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala

bidang anggaran. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup otorisasi anggaran.

- b. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai fungsi:
  - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
  - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
  - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
  - 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
  - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang otorisasi anggaran;
  - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;
  - 4) Pengkoordinasian DPA dan DPPA SKPKD;
  - 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan anggaran kas pemerintah daerah;

## 9. Bidang Pembendaharaan

- a. Bidang pembendaharaan dipimpin oleh seseorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup



pembebanan belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;

- b. Kepala bidang pembendaharaan mempunyai fungsi;
  - 1) Perumusan kebijakan program kegiatan bidang pembendaharaan;
  - 2) Perumusan kebijakan pengelolaan bidang pembendaharaan;
  - 3) Melaksanakan kebijakan bidang pembendaharaan;
  - 4) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pembendaharaan;
- c. Kepala bidang pembendaharaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pembendaharaan;
  - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang pembendaharaan;
  - 3) Melaksanakan fungsi kegiatan sebagai kuasa bendahara umum daerah;
  - 4) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang belanja tidak langsung, belanja langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;
  - 5) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

#### 10. Sub Bidang Belanja Langsung:

- a. Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh seseorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup belanja langsung:

- b. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai fungsi:
    - 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
    - 2) Peraturan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
    - 3) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan belanja langsung;
    - 4) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.
  - c. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Penyiapan rencana program dan kegiatan sub bidang belanja langsung;
    - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja langsung;
    - 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang belanja langsung;
    - 4) Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar (SPM) belanja langsung SKPD;
11. Sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelola kas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mempunyai rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.
  - c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas;

- d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar belanja tidak langsung dan pembiayaan dari SKPD.

## 12. Bidang Verifikasi

- a. Bidang Verifikasi dipimpin oleh seseorang kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup BPKD di bidang verifikasi.
- b. Kepala Bidang verifikasi mempunyai fungsi:
  - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
  - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang verifikasi;
  - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bidang Verifikasi;
  - 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
- c. Kepala bidang Verifikasi mempunyai rupaian tugas sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan rencana, anggaran, dan kegiatan bidang verifikasi;
  - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang verifikasi;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi;
  - 4) Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;

## 13. Fungsi Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;

- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- d. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar dari SKPD;

#### 14. Bidang Akuntansi

- a. Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban APBD.
- b. Kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan akuntansi;
  - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan akuntansi;
  - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan akuntansi;
  - 4) Pengurusan penyelenggaraan urusan akuntansi;
  - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang akuntansi;
  - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang akuntansi;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;
  - 4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisai dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;

15. Fungsi kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup akuntansi;
- c. Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit;
- d. Menghimpun proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas;
- e. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

16. Fungsi Sub Bidang Neraca sebagai berikut:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang neraca;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup neraca;
- c. Penghimpun dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi pelaporan keuangan SKPD dengan keuangan SKPKD

#### **B. Analisa Laporan keuangan BUMD Kabupaten Enrekang**

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat, para anggota legislatif, yudikatif, lembaga pemeriksa dan pengawas, pihak yang berperan dalam proses pinjaman dan investasi serta dari pihak pemerintah sendiri. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan dan kewajiban yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah disetiap entitas pelaporan sektor publik diseluruh Indonesia, yang mana pelaksanaannya mulai berlaku sejak pengelolaan keuangan anggaran pemerintah tahun 2005.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menyangkut kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang terhadap PAD, peneliti menemukan yakni dimana BUMD Kab.Enrekang hanya 1 yaitu PDA dan diperjelas sebagai berikut :

### **1. Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Daerah**

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang dalam pertanggung jawaban telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan dalam negeri No.13 Tahun 2006 untuk menyajiakan Laporan keuangan. Agar lebih jelasnya, berikut penulis penulis akan menjabarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh PDAM Tirta Massenrenpu yang satu-satu adala Badan Usaha Daearah Kabupaten Enrekang.

#### **a. lapran Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu priode akuntansi. Didalam laporan ini laporan posisi kas akan dilihat dari kegiatan operasi, penandaan dan investasi. Berikut penulis melapirkan laporan arus kas PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupeten Enrekang uantuk tahun 2016-2017;

**TABEL 4. 1**  
**PDAM Tirta Massenrenpulu**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Per 31 Desember 2017**

NO	U R A I A N	TAHUN 2017 (Rp.-)	TAHUN 2016 (Rp.-)
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Laba/(Rugi) Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	(7,057,557,112.26)	(8,422,571,651.21)
	Penyesuaian untuk :		
	- Beban Penyisihan Piutang	17,671,207.01	8,698,819,404.72
	- Biaya Penyusutan dan Amortisasi	8,367,637,019.25	-11,714,495.13
	- Koreksi Saldo Laba/(Rugi)	0.00	0.00
	Laba Rugi Sebelum Perubahan Modal Kerja	1,327,751,114.00	264,533,258.38
	Ditambah/(dikurangi)		
	- (Kenaikan)/ Penurunan Piutang Usaha	(550,049,984.00)	(78,777,988.00)
	- (Kenaikan)/ Penurunan Persediaan	(37,152,279.00)	46,500,700.00
	- (Kenaikan)/ Penurunan Pembayaran Dimuka	0.00	0.00
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	0.00	(98,491,400.00)
	- Kenaikan (Penurunan) Biaya Yg Masih Hrs Dibayar	(243,639,287.00)	242,743,737.00
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Non Usaha	0.00	(434,589,756.79)
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Bunga	0.00	(419,875,820.01)
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Jk. Panjang Jt. Tempo	0.00	(427,676,964.68)
	Jumlah Penambahan/(Pengurangan)	(830,841,550.00)	(1,170,167,492.48)
	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	496,909,564.00	-905,634,234.10
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	- (Kenaikan)/Penurunan Perolehan Asset Tetap	-2,487,555,927.00	(7,633,756,900.00)
	- Pengurangan (Penambahan) A.Tetap Dlm Penyelesaian	0.00	
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2,487,555,927.00)	(7,633,756,900.00)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Jangka Panjang	0.00	(24,628,379.84)
	- Kenaikan (Penurunan) Bunga Masa Tenggang	0.00	(3,883,417.60)
	- Pembayaran Dimuka Kepada PEMKAB Enrekang	(100,000,000.00)	(75,000,000.00)
	- Penyertaan Pemerintah Kabupaten Enrekang	2,000,000,000.00	1,282,142,541.54
	- Penyertaan Pemerintah Pusat	0.00	7,158,420,000.00
	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	1,900,000,000.00	8,337,050,744.10
	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(90,646,363.00)	(202,340,390.00)
	Kas dan Setara Kas Awal Periode	488,945,640.31	691,286,030.31
	KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	398,299,277.31	488,945,640.31

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*

b. Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 Paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas.

Berikut penulis akan melampirkan laporan posisi keuangan (Neraca) PDAM Tirta Massenrenpulu sebagai satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2017.

**TABEL 4.2**  
**PDAM Tirta Massenrenpulu**  
**NERACA**  
**Per 31 desember 2017**

5	ASSET	Ref	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
I.	ASSET LANCAR			
	Kas dan Bank	1.1	398,299,277.31	488,945,640.31
	Piutang Usaha	1.2	1,541,939,508.00	991,889,524.00
	Akm. Penyisihan P. Usaha	1.3	(52,969,146.16)	-35,297,939.15
	Piutang Usaha Bersih		1,887,269,639.15	1,445,537,225.16
	Persediaan	1.4	191,377,129.00	154,224,850.00
	Jumlah Aset Lancar		2,078,646,768.15	1,599,762,075.16
II.	ASSET TIDAK LANCAR			
	ASSET TETAP			
	Nilai Historis		118,927,238,760.84	116,439,682,833.84
	Akm. Penyusutan Aset Tetap		(56,760,934,324.30)	(48,393,297,305.05)
	Akm. Kerugian Penurunan Nilai		0.00	0.00
	Nilai Buku	1.5	62,166,304,436.54	68,046,385,528.79



	Pembayaran Dimuka Kepada PEMKAB Enrekang	1.6	728,500,000.00	628,500,000.00
	Jumlah Asset Dlm. penyelesaian		728,500,000.00	628,500,000.00
	JUMLAH ASSET		64,973,451,204.69	70,274,647,603.95
NO	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Ref	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
III.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Hutang Usaha		0.00	0.00
	Hutang Non Usaha		0.00	0.00
	Biaya YMH Dibayar	1.7	7,479,450.00	251,118,737.00
	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek		7,479,450.00	251,118,737.00
IV.	EKUITAS			
	Modal			
	Penyertaan PEMKAB Enrekang	1.8	73,022,962,521.54	71,022,962,521.54
	Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya	1.9	40,879,117,000.00	40,879,117,000.00
	Laba Ditahan/(Akm. Kerugian)	1.10	- 41,878,550,654.59	-33,455,979,003.38
	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	1.11	- 7,057,557,112.26	- 8,422,571,651.21
	Jumlah Ekuitas		64,965,971,754.69	70,023,528,866.95
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		64,973,451,204.69	70,274,647,603.95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

### c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ekuitas terdiri saldo awal, modal pada neraca saldo setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode

Berikut penulis akan lampirkan Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Tirta Massenrenpulu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang.

TABEL 4. 3  
 PDAM Tirta Massenrenpulu  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 Per 32 Desember 2017

NO	KETERANGAN	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	Laba Ditahan/ (Akumulasi Kerugian)	Jumlah Ekuitas
I.	Saldo per 31 Desember 2015	69,740,819,980.00	33,720,697,000.00	(33,455,979,003.38)	70,005,537,976.62
	Penambahan Modal tahun 2016	0.00	7,158,420,000.00	0.00	7,158,420,000.00
	Penyertaan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya	1,282,142,541.54	0.00	0.00	1,282,142,541.54
	Koreksi laba/Rugi Tahun Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
	Laba (Rugi) tahun 2016	0.00	0.00	(8,422,571,651.21)	(8,422,571,651.21)
III	Saldo per 31 Desember 2016	71,022,962,521.54	40,879,117,000.00	(41,878,550,654.59)	70,023,528,866.95
	Penambahan Modal tahun 2017	0.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
	Penyertaan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Koreksi laba/Rugi Tahun Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
	Laba (Rugi) tahun 2017	0.00	0.00	(7,057,557,112.26)	(7,057,557,112.26)
	Saldo per 31 Desember 2017	71,022,962,521.54	42,879,117,000.00	(48,936,107,766.85)	64,965,971,754.69

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah

#### d. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode akuntansi waktu tertentu, laporan laba rugi meringkas jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi serta keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan usaha.

Berikut penulis akan menjabarkan laporan Laba Rugi pada PDAM Tirta Massenrenpulu sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang

**TABEL 4. 4**  
**PDAM Tirta Massenrenpulu**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Per 31 Desember 2017**

NO	URAIAN	TAHUN 2017 (Rp.-)	TAHUN 2016 (Rp.-)
I.	<b>PENDAPATAN USAHA</b>		
a	Pendapatan Air	6,515,633,940.00	6,147,630,130.00
b	Pendapatan Non Air	507,139,573.00	493,485,400.87
-	Pendapatan Sambungan Baru	296,623,500.00	317,251,000.00
-	Pendapatan Sewa Instalasi	0.00	0.00
-	Pendapatan Balik Nama	350,000.00	800,000.00
-	Pendapatan Penggantian Meter Rusak	0.00	0.00
-	Pendapatan Penyambungan Kembali	55,650,000.00	51,760,675.00
-	Pendapatan Denda	116,397,000.00	120,555,000.00
-	Pendapatan Non Air Lainnya	38,119,073.00	3,118,725.87
	Jumlah Pendapatan Usaha	7,022,773,513.00	6,641,115,530.87
c	Pendapatan Lain – Lain	12,739,195.00	11,835,027.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>	<b>7,035,512,708.00</b>	<b>6,652,950,557.87</b>
II.	<b>BEBAN USAHA</b>		
a	Beban Operasional		
-	Beban Pegawai	3,185,402,910.00	3,183,919,536.00
-	Beban Pemakaian Bahan Kimia	232,875,000.00	223,905,000.00
-	Beban Sewa	0.00	0.00
-	Beban BBM	0.00	0.00
-	Beban Listrik	44,924,609.00	36,987,214.00
-	Beban Pinjaman	0.00	0.00
-	Beban Kantor	60,961,730.00	144,572,399.00
-	Beban Hubungan Langganan	95,617,825.00	74,073,440.00
-	Beban Pemeliharaan	848,653,559.00	1,414,031,608.62
-	Beban Pendidikan dan Latihan	0.00	53,650,000.00
-	Beban ATK dan Barang Cetak	31,926,828.00	32,542,700.00
-	Beban Pajak dan Retribusi	17,210,454.00	20,728,923.00
-	Beban Penyisihan Piutang	17,671,207.01	0.00
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,367,637,019.25	8,667,050,540.46

	- Kerugian Penurunan Nilai	0.00	0.00
	- Rupa-Rupa Biaya Umum	682,560,930.00	799,218,080.00
	- Beban Operasional Lainnya	504,649,508.00	421,918,847.00
	Jumlah Beban Operasional	14,090,091,579.26	15,072,598,288.08
b	Beban Non Operasional	2,978,241.00	2,923,921.00
	JUMLAH BEBAN USAHA	14,093,069,820.26	15,075,522,209.08
	LABA USAHA	(7,057,557,112.26)	(8,422,571,651.21)
	BEBAN PAJAK	0.00	0.00
	LABA/(RUGI) Setelah Pajak	(7,057,557,112.26)	(8,422,571,651.21)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan data diatas tentang laporan keuangan yang disusun oleh bagian Akuntansi pada Perusahaan Air Mineral yang satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan Peraturan dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dengan penegasan bahwa pelaporan keuangan daerah taat perundangan-undangan, efisiensi, ekonomis, transparan.

## 2. Analisis Rasio Keuangan PDAM

Analisis Rasio Keuangan Badan Usaha Milik Daerah maka penulis menggunakan beberapa Rasio:

### a) Rasio Lancar

Rasio lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio memiliki asset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Rasio Lancar dapat dirumuskan sebagai beriku:

$$R \quad L = \frac{A}{H} \frac{L}{L} \times 100\%$$

$$R \quad L = \frac{2,078,646,768.15}{7,479,450.00} \times 100\%$$

$$= 0,3\%$$

Setiap 1 utang lancar dijamin oleh 0,3 harta atau perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 1 : 0,3. Jadi PDAM Tirta Massenrenpulu tidak baik dalam membayar utang lancar .

#### b) Rasio Cepat

Rasio cepat membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat menginditipikasikan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Rasio Cepat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad C = \frac{A \quad L \quad -P}{H \quad L} \times 100\%.$$

$$R \quad C = \frac{2,078,646,768.15 - 191,377,129.00}{7,479,450.00} \times 100\%$$

$$= 2,1 \%$$

Setia 1 utang dijamin dengan 2,1 harta atau perbandingan antara aktiva lancar adalah 2,1 : 1, jadi PDAM Tirta Massenrenpulu keadaanya sangat baik karna perusahaan dapat membayar utang walaupun sudah dikurangi dengan persediaan.

#### c) Rasio Kas

Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan badan usaha milik daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio Kas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad K = \frac{K + s \quad b \quad ha}{H \quad L} \times 100\%$$

$$R \quad K = \frac{398,299,277.31 + 0}{7,479,450.00} \times 100\%$$

$$= 0.1\%$$

Setiap 1 utang lancar dijamin oleh 0,1 harta atau perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 0,1 : 1. Jadi PDAM Tirta Massenrenpulu tidak baik dalam membayar utang yang segera dipenuhi.

### C. Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Mengukur peran Badan Usaha Milik Daerah dalam peningkatan suatu Pendapatan Asli Daerah dilihat dari laporan laba rugi suatu perusahaan daerah dengan menggunakan analisis rasio untuk menentukan seberapa besar kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut penulis menjabarkan rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi Badan Usaha Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### a. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentanbilitas modal sendiri adalah perbandingan antar jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal disuatu pihak dengan umlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dipihak lain. Rentanbilitas dapat dirumukan sebagai berikut.

$$R \quad M \quad S = \frac{L \quad S \quad h \quad P}{M \quad S} \times 100\%$$

$$R \quad M \quad S = \frac{-7,057,557,112.26}{398,299,277.31} \times 100\%$$

$$= -17,7 \%$$

Hasil diatas diperoleh dari Tabel 4. 4 yaitu Laporan Laba Rugi. Dari rasio rentabilitas PDAM kurang mampu memperoleh laba, mengalami kerugian selama beberapa tahun dilihat pada tahun 2017 terakhir dengan nilai rentabilitas sebesar (-17,7%).

b. Rentanbilitas Ekonomi

Rentanbilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam presentase. Rentanbilitas ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$R_t \quad E = \frac{L \quad s_i \quad h P}{M \quad P} \times 100\%$$

Perusahaan Daerah Air Mineral Tirta Massenrenpulu tidak memiliki pinjaman dari pihak kreditur manapun dilihat dari laporan keuangan laba rugi, jadi penulis tidak dapat menggambarkan rentanbilitas ekonomi perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis antara rentabilitas modal sendiri dan rentanbilitas ekonomi yakni perusahaan PDAM tidak mampu memperoleh laba dilihat dari rentabilitas modal sendiri sebesar -17,7% dan dari rentabilitas ekonomi penulis tidak dapat menggambarkan karena tidak memiliki pinjaman dari pihak atau kreditur manapun jadi penulis tidak dapat mengetahui rentabilitas ekonominya.

c. Kontribusi PDAM yang satu-satunya mitra BUMD selama tiga tahun terakhir yang penulis teliti.

Tabel. 4. 5  
Kontribusi PDAM Tirta Massenrenpulu Terhadap PAD  
Priode 2015 - 2017

Tahun	Laba sesudah pajak	Modal sendiri	Prentase (%)
2015	-7,340,426,563.37	691,286,030.31	-10,6 %
2016	-8,416,441,461.21	488,945,640.31	-17,2 %
2017	-7,057,557,112.26	398,299,277.31	-17,7 %

*Sumber. Badan pengelola keuangan kab.enrekang dan diolah penulis*

Tingkat kontribusi PDAM terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2017 tidak mampu memperoleh laba dengan baik dilihat dari besarnya presentase setiap tahunnya. Diketahui bahwa PDAM adalah satu-satunya badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Enrekang yang menunjang pendapatan asli daerah.

Tingkat efektivitas suatu penerimaan PAD sebaiknya selalu tinggi atau mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pembiayaan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang sumber dananya juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas yang tinggi merupakan salah satu keberhasilan suatu organisasi.

Sumber-sumber PAD yang sah harus ditambah dari berbagai aspek sehingga banyak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD harus tetap dijaga konsistensinya bahkan ditingkatkan. Namun tidak serta merta meninggalkan sumber penerimaan yang lainnya karena potensi suatu daerah tidak hanya terletak pada satu atau sebagian sumber pendapatan asli daerah.



Analisis yang dilakukan penulis maka diperoleh hasil dari laporan keuangan PDAM Tirta Massenrenpul dan kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang dari uji hipotesis sebagai berikut

Laporan keuangan pada badan usaha milik daerah telah benar-benar sesuai dengan peraturan dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pencatatan laporan kertas kerja, neraca, laba rugi, ekuitas, arus kas, pajak, piutang, persediaan, dan pelaporan kas telah dilaporkan secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat

Selain itu hasil penelitian penulis menggambarkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah tidak berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat dari besarnya persen yg didapat dari rentabilitas terhadap modal sendiri sebanyak -17% dari laporan laba rugi perusahaan, namun perlu dikehui bahwa BUMD memberikan kontribusi sebanyak Rp.100.000.000.00 ditahun yg digunakan untuk belaja daerah Kabupaten Enrekang

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Umy Rianti dengan judul Analisisl Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Warga Sumber Daya Air dikabupaten Pelawan dengan hasil penelitian laporan keuangan belum sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2005 dan peratruan dalam Negeri No 13 Tahun 2006, dan hasil penelitian ini yang penulis teliti bahwa

laporan keuangan BUMD telah sesuai dengan peraturan dalam Negri No 13 Tahun 2006.

Penelitian ini pula tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Purnomo Aji dengan judul analisis sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dikabupaten Buleleng, dengan hasil penelitian bahwa kontribusi sumber efektifitas PAD tahun 2009-2013 berada pada kategori efektif dengan rata-rata 112,14% dan kontribusi terbesar pada tahun 2009-2013 yang diperoleh dari lain-lain yang sah sebesar 43,13%, Sedangkan hasil yang diteliti oleh penulis menemukan bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD tidak efektif dilihat pada tiga tahun terakhir 2015-2017 dengan memperoleh presentase -10,6%, -17,2%, -17,7% dan kontribusi terbesar pada tahun 2015 dengan tingkat kontribusi sebesar -10,6%, BUMD dalam setiap tahun mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap PAD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis perlu menarik suatu kesimpulan dan dari kenyataan yang ditemui sepanjang analisa dalam kasus ini, maka akan diajukan pula beberapa saran yang mungkin dapat diperlukan oleh Badan Usaha Enrekang terhusus pada PDAM Tirta Massenrenpulu dan umumnya pada pemerinthan Kabupaten Enrekang

1. Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaporan keuangan telah sesai dengan peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 sebagaimana kelanjutan untuk memperbaiki system keuangan pemerintah daerah .
2. Badan Usaha Milik Daerah tidak berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat dari besarnya persen yg disapat dari rentanbilas terhadap modal sendiri sebanyak -17% dari laporan laba rugi perusahaan.
3. Badan usaha milik daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah hanya satuyakni PDAM sehingga asset pemkap Kabupaten Enrekang yang diperoleh dari usaha-usaha yang berkontribusi.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Badan usaha milik daerah minimal mempertahankan atas laporan keuangan yang telah dibuat atau disusun saat ini yang telah sesuai dengan peraturan menteri dam negri No.13 Tahun 2006
2. Mengurangi biaya-biaya oprasional yang tidak terlalu relepan dengan biaya oprsional perusahaan PDAM misalnya pemakaian listrik, beban kantor, beban pemeliharaan rupa-rupa, biaya umum, yang kurang jelas alokasi anggarannya, sehingga dapat berkontribusi baik terhadap PAD tahun depan.
3. Badan usaha daerah kabupaten enrekang harus meambah usaha yang bergerak disegala bidang semisal pariwisata, Bank pembangunan daerah, angkutan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah sehingga banyak yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Addul. Halim. 2015. Akutansi Keuangan Daerah. Salemba Jakarta
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, 2018
- Bastian. Indra. 2006. Akutansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Falikhatun dan Putri Nugrahngensi. 2007. Analisis Laporan Keuangan, Surakarta: FE UNS
- Hanafi, Mahmud M dan Abdul Halim. 2003. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Revisi Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Harahap. Sofyan S. 2005. Teori Akutansi, Salemba Empat; Jakarta
- Kasmir, 2017. Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers; Jakarta
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Yogyakarta; UUP STIM YKPN
- Mardismo. 2009. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta; Andi Offset
- Munawir, 2010. Analisis Laporan Keuangan, Liberty; Yogyakarta
- Numberi . Agustinus . 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika
- Prastowo. Dwi D dan Rirka Julianti, 2002. Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi, Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKAPN
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standard Akutansi Pemerintah, Penerbit Fokusmedia
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang System Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Republik Indonesia. 2000. Praturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 Tentang  
Pengelolaan Dan Pertanggung Jawabn Keuangan Daerah

Widjaja. HAW. 2003. Titik Berat Otonomi Pada daerah Tingkat II. PT. Raja  
Grafindo Persada. Jakarta

LAMPPIRXN

## 1. WAWANCARA

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui hasil interview yang peneliti lakukan mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut

- a). Ada berapa badan usaha milik daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten Enrekang saat sekarang ini ?
- b). Apakah pendapatan PDAM yang satu-satunya badan usaha milik daerah kabupaten Enrekang diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk dikelola ?
- c). Berapa persen dari hasil pendapatan yang diserahkan kepada daerah untuk dikelola?
- d). Dana yang diserahkan untuk daerah dimanfaatkan dalam kegiatan hal apa ?

Jawaban kepala bidang akuntansi dari pertanyaan yang diberikan oleh penuli diatas adalah sebagai berikut :

- a). “Badan usaha milik daerah kabupaten Enrekang saat ini cuma PDAM ( Perusahaan Daerah Air Mineral ) yang baru-baru juga dikeluarkan surat keputusan oleh pemerintah Daerah.”
- b). “ Tidak. Pendapatan yang dihasilkan oleh PDAM tirta Masserenpulu hanya sesuai dengan kesepakatan oleh Pemda dan pihak PDAM.
- c). “ Pembagian yang telah disepakati bersama antara pemda dan pihak PDAM itu bukan dalam persen namun melainkan sesuai dengan pendapatan seperti tahun 2016 sebesar Rp. 75.000.000 dan pada tahun



2017 kemarin sebesar Rp.100.000.000 dan itu sudah disepakati diawal penyuan buku tahunan.

- d). “ Dana yang diserahkan oleh PDAM ke Pemda Kabupaten hanya digunakan untuk belanja daerah saja sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk dana yang tersisa dikantor digunakan untuk perbaikan di beberapa cabang PDAM di Kabupaten Enrekang.



**Azfril**, Lahir di Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang Desa Tobalu, pada tanggal 11 November 1995 sebagai anak bungsu dari enam bersaudara. Merupakan buah hati dari pasangan Sahaman dan Napira . penulis memulai jenjang pendidikan formal di tingkat SD Negeri 97 Tobalu di Kabupaten Enrekang dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya bertempat di SMP Negeri 1 Enrekang kabupaten Enrekang dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan ke tingkat SMK 1 PGRI Enrekang di Kabupaten Enrekang dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama pula (2014) penulis terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi menempuh pendidikan di Makassar. Penulis aktif pada suatu perkumpulan organisasi external kampus yakni Himpunan Mahasiswa Massenrenpulu (HPMM).